

PERAN GEREJA KATOLIK KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG DALAM PENDIDIKAN POLITIK UMAT MENJELANG PEMILU TAHUN 2019

Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D.*, M Arung Palaga**

*yuwantosaja@gmail.com

**williammedafa@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Diponegoro, Semarang

ABSTRAK

Gereja katolik Indonesia yang selama ini dipandang lamban merespon perkembangan politik dan pasif dalam menyikapi dinamika kehidupan politik serta dipandang tabu oleh sebagian masyarakat, sebab bukan ranah gereja katolik mencampuri urusan politik, kini melibatkan diri dengan mengambil peranannya sebagai sebuah institusi keagamaan. Dalam konteks pemilu tahun 2019, keterlibatan Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang dalam pendidikan politik semata-mata bukan untuk mempromosikan dirinya sendiri, melainkan bentuk respon atas keprihatinannya terhadap kesadaran umat katolik yang dinilai rendah untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihannya dibidang politik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan gereja katolik dengan mengidentifikasi strategi dan bentuk pendidikan politik kepada umat katolik menjelang pemilu tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara kepada narasumber, observasi serta studi dokumen-dokumen resmi Gereja Katolik. Teori kelompok kepentingan dan pendidikan politik digunakan untuk menganalisis temuan-temuan dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai sebuah institusi, Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang berperan memberikan pendidikan politik kepada umat secara intensif melalui berbagai strategi dan bentuk baik melalui media massa, media sosial maupun pendampingan secara langsung kepada umat dan para calon legislatif katolik di Kota Semarang serta menjalin relasi dengan KPU, Bawaslu dan Organisasi kemasyarakatan. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa hambatan seperti rendahnya pemahaman umat terhadap politik, ketidakpedulian umat terhadap pendidikan politik, dan ketidaknetralan gereja katolik dalam mendukung calon tertentu serta rendahnya partisipasi umat dalam pendidikan politik ini menjadi topik yang menarik dalam penelitian ini.

Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang memainkan peranannya sebagai institusi keagamaan dengan sangat baik yang semestinya harus netral dengan tidak mengarahkan umat untuk mendukung calon tertentu, mengoptimalkan peran hierarkis gereja katolik dan organisasi kemasyarakatan katolik untuk meningkatkan partisipasi umat katolik dalam pendidikan politik.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Peran Gereja Katolik, Institusional, Keuskupan Agung Semarang

THE ROLES OF ROMAN CATHOLIC CHURCHES IN THE ARCHDIOCESE OF SEMARANG TOWARDS THE POLITICAL EDUCATION FOR THE CATHOLICS PRIOR TO THE GENERAL ELECTION IN 2019

Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D.*, M Arung Palaga**

*yuwantosaja@gmail.com

**williammedafa@gmail.com

Politics and Government Department, Faculty of Social and Political Science – Universitas Diponegoro, Semarang

Abstract

The Roman Catholic Churches in Indonesia had always been seen to give a slow response to the political development. They were also thought to give less contribution in Indonesian politics due to the misconception in the society that these churches were not supposed to be involved in the political affair. Nowadays, they have been participating to play their role as a religious institution. In the 2019's general election context, the Roman Catholic Churches in the Archdiocese of Semarang took part in the political education not only for promoting the churches themselves, but also for giving their response to the fact that many Catholics tend to avoid participating in the general election

This research was aimed to find out the roles and strategies and to identify the form of political education for Catholics prior to the general election in 2019. A descriptive qualitative method was used to collect the data through interview, observation, and documentation study from the legal resources of the Roman Catholic Church. Group of interests and political education were used as methods of analyzing the data.

The result showed that as an institution, the Roman Catholic Churches in the Archdiocese of Semarang have implemented an intensive political education through mass media, social media, and direct accompaniment not only for the Catholics in general but also those who participated as the legislative candidates in Semarang. They have also built relationship with the General Elections Commission, the General Election Supervisory Agency, and society organizations. The finding of the study showed some obstacles among the Catholics, such as low political awareness, denial against the political education, and political deviation of the churches to support certain legislative candidates, and low participation in the general election.

The Roman Catholic Churches in the Archdiocese of Semarang have played their roles as religious institutions very well. It is expected that they do not influence the Catholics to support certain legislative candidates. Besides, they are able to optimize the roles of the church hierarchy and the Catholic society organizations in order to improve the participation of the Catholics in political education.

Keywords: Political Education, Roles of Roman Catholic Church, Institutional, Semarang Archdiocese

PENDAHULUAN

Gereja merupakan merupakan persekutuan umat yang melakukan upacara keagamaan tentang kepercayaan, ajaran dan tata cara yang sama yang percaya akan Yesus Kristus. “*Aggiornamento*” yang artinya “memperbarui” merupakan upaya untuk pembaharuan diri gereja, dimana gereja dipanggil untuk memperbaharui dirinya karena gereja sadar bahwa dimasa lalu gereja tidak terbebas dari politik-politik yang disebut politik sektarian yaitu politik yang lebih banyak didasarkan pada kepentingan-kepentingan diri dengan menafikan kelompok yang lain, sehingga gereja mulai menyadari dan memperlakukan politik sebagai sesuatu yang baik dan agung sifatnya. Atas upaya pembaruan diri tersebut maka lahirlah Konsili Vatikan ke-II yang menghasilkan banyak dokumen penting dalam Gereja Katolik. Salah satu dokumen Konsili Vatikan ke- II yaitu “*Gaudium et Spes*” atau Kegembiraan dan Harapan, yang didalamnya memuat tentang pentingnya martabat manusia dan keterlibatan Gereja Katolik dalam politik yang berpusat pada kepentingan umum (*bonum commune*).

Dalam tataran Negara Indonesia, Gereja Katolik Indonesia yang selama ini dipandang lamban merespon perkembangan politik dan pasif dalam menyikapi dinamika kehidupan politik serta dipandang tabu oleh sebagian masyarakat, sebab bukan ranah gereja katolik mencampuri urusan politik, kini melibatkan diri dengan mengambil peranannya sebagai sebuah institusi keagamaan. Keprihatinan Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang atas permasalahan yang terjadi tersebut melandasi peranannya sebagai sebuah kelompok yang berinstitusi keagamaan dengan memainkan peranannya melalui sebuah komisi yang bernama Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Semarang (PK4AS) yang dibentuk oleh Uskup Agung Semarang, Mgr. Ignatius Suharyo pada tahun 1998. PK4AS sebagai sebuah komisi dibentuk untuk membantu tugas uskup dalam mengelola bidang kerasulan kemasyarakatan di tingkat keuskupan dan memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan pendidikan politik kepada umat katolik dengan tujuan mewujudkan kesadaran untuk ikut ambil bagian menjadi warga negara yang 100% katolik dan 100% Indonesia yang berlandaskan kasih.

Dalam konteks pemilu serentak tahun 2019, keterlibatan Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang dalam pendidikan politik semata-mata bukan untuk mempromosikan dirinya sendiri, melainkan suatu bentuk respon atas keprihatinannya terhadap kesadaran umat katolik yang dinilai rendah untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihannya dibidang politik. Pemilu serentak Tahun 2019 yang merupakan pemilu serentak pertama dengan lima surat suara untuk memilih Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, serta DPD RI yang dinilai sulit dan cukup membingungkan, serta banyak terjadi fenomena politik identitas yang berkembang di masyarakat Indonesia, maka sebagai langkah dan sikap untuk memerangi hal tersebut, Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang mengambil peranannya sebagai sebuah kelompok kepentingan dengan membangun kesadaran umat katolik untuk menjadi pemilih yang beriman, cerdas, dan bijaksana sebagai perwujudan akan imannya dan rasa cinta tanah air Indonesia.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Peran Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang sebagai kelompok kepentingan dalam melakukan pendidikan politik kepada umatnya menjelang pemilu tahun 2019. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kota Semarang yang merupakan tempat induk keuskupan yang menjadi domisili dari seorang Uskup Agung, pemimpin tertinggi di tataran gereja keuskupan.

KERANGKA TEORI

1. Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa, yang diarahkan pada upaya membina kemampuan individu untuk mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang bebas otonom dan mengembangkan dimensi sosialnya dalam kaitan dengan kedudukannya sebagai warga negara. *Holdar and Zakharchenko*, menyebut pendidikan politik sebagai pendidikan publik (*public education*), yaitu upaya pelibatan warga negara dalam suatu komunitas untuk menciptakan budaya partisipasi.

Selain itu pendidikan politik juga dimaknai sebagai usaha untuk membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik dan menumbuhkan kemampuan partisipasi politik secara aktif, dengan

terlibat memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya yang mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik.

Manfaat pendidikan politik dapat melatih warganegara agar meningkat partisipasi politiknya. *Huntington* dalam jurnal *Nasiwan* mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Definisi ini mensyaratkan bahwa yang tercakup dalam partisipasi politik adalah kegiatan, dengan demikian orientasi-orientasi para warga negara terhadap politik, pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai politik kompetisi dan keefektifan politik, persepsi-persepsi tentang relevansi politik, itu seringkali juga tidak berkaitan. Lewat pendidikan politik individu diajarkan bagaimana mereka mengumpulkan informasi dari berbagai media massa, diperkenalkan mengenai struktur politik, lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga pemerintahan.

2. Teori Kelompok Kepentingan (*Interest Group Theory*)

Kelompok kepentingan (*interest group*) merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan. Dengan kata lain, tujuan mereka hanyalah berusaha untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya.

Dalam prakteknya ada berbagai macam tipe kelompok kepentingan yang beroperasi dalam masyarakat, yang mana mereka berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sebagai kelompok nonpemerintah, mereka dapat berupa kelompok profesional, persatuan buruh, pedagang, pengusaha, organisasi keagamaan, persatuan pedagang, organisasi-organisasi persatuan mahasiswa, lembaga-lembaga pemikiran, asosiasi cendekiawan atau pakar, asosiasi perusahaan, universitas, organisasi berbasis etnik, daerah, keturunan (wangsa), dan lain-lain. Kekuatan mereka berasal dari status keanggotaan serta sumberdaya manusia maupun dana dan jaringan yang dimiliki. Kelompok-kelompok kepentingan seringkali menjadi penentu agenda, penggalang isu, penyebar gagasan, perumus kebijakan, serta pendesak kepada pemerintah.

Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell dalam bukunya *Comparative Politics Today: A World View (1992)* seperti yang dikutip dalam buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (hlm. 387 - 388) membagi kelompok kepentingan menjadi empat kategori, yakni:

1. Kelompok Anomik, yang merupakan kelompok kepentingan yang bersifat spontan, terbatas, muncul seketika. Kelompok kepentingan ini memiliki tingkat kemampuan komunikasi politik yang rendah, dengan ikatan keanggotaan yang longgar, dan hanya dalam rangka untuk menanggapi insiden tertentu. Kelompok ini mempunyai perasaan yang sama yaitu ketidakpuasan dan frustrasi yang secara spontan sehingga melahirkan demonstrasi dan kerusuhan. Namun demikian, setelah aspirasi mereka didengar oleh pemerintah maka kelompok ini akan bubar.
2. Kelompok Non Assosiasional, yang merupakan kelompok yang tumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada sanak saudara, kelompok etnis kerabat, wilayah, agama, dan juga pekerjaan. Jaringan kelompok ini terbatas, tetapi lebih baik ketimbang kelompok anomi. Dalam hal keanggotaannya, kelompok non assosiasional ini berbeda dengan kelompok anomi dalam hal keanggotaannya, karena kelompok ini memiliki hubungan ekonomi, massa konsumen, kelompok etnis, dan biasanya bersifat sama latar belakang atau identitasnya.
3. Kelompok Instiusional yang merupakan kelompok kepentingan yang melembaga secara formal, dengan kegiatan rutin, serta jaringan organisasi yang kuat dan memiliki keanggotaan yang bersifat resmi. Kelompok ini memiliki fungsi sosial dan politik yang luas, mencakup hampir sebagian besar segi kehidupan (ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, seni, hukum, keluarga, lingkungan, dan lain-lain), di samping tujuan-tujuan khusus yang mereka miliki. Kelompok ini bekerja sama secara erat dengan pemerintahan.
4. Kelompok Assosiasional, yaitu kelompok yang memiliki organisasi yang bersifat formal, dan terorganisir secara baik, dengan keanggotaan yang resmi atau bersifat formal pula. Kelompok assosiasional beranggotakan orang-orang yang berasal dari profesi yang sama, dengan tujuan spesifik untuk mewakili kepentingan anggotanya atas bidang-bidang tertentu yang menjadi fokusnya.

Berdasarkan uraian diatas, Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang merupakan kelompok kepentingan institusional dimana gereja katolik merupakan lembaga yang secara formal memiliki kepentingan untuk melakukan pendidikan politik kepada umat dengan mendorong umat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan benar serta memiliki visi dan misi bersama yaitu mencapai apa yang disebut dengan “*bonnum comune*“ yang memiliki arti bahwa gereja katolik harus menciptakan kebaikan dan kesejahteraan bersama.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah untuk mengetahui secara mendalam peran Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang dalam pendidikan politik menjelang pemilu tahun 2019 kepada umat katolik di Kota Semarang dengan menganalisis kejadian, fenomena yang muncul menjelang pemilu tahun 2019, serta strategi dan bentuk pendidikan politik yang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu *purposive sample*. *Purposive sample* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu seperti dapat dipercaya, memiliki wawasan dan pandangan luas mengenai peran gereja katolik pada masa pemilu tahun 2019 serta terlibat langsung dalam proses pendidikan politik. Informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu meliputi para romo yang terlibat dalam pendidikan politik, tim dari keuskupan, caleg katolik dan juga umat yang tersebar di 13 gereja katolik di Kota Semarang. Informan tersebut akan diwawancarai secara langsung dan dianalisis menggunakan prosedur reduksi data sebagai tahap pemilihan data-data penting, lalu dokumentasi di lapangan yang menghasilkan data primer dan sekunder, kemudian diolah dalam bentuk yang sederhana dengan cara merangkum hasil wawancara dan disajikan dalam bentuk uraian teks kemudian peneliti melakukan analisis dan interpretasi terhadap data tersebut menciptakan pengetahuan baru mengenai suatu objek yang diteliti menjadi lebih jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang sebagai sebuah kelompok kepentingan institusional mengambil peranannya dalam pendidikan politik secara intensif bertujuan untuk mewujudkan umat yang sadar dan melek politik dengan pendampingan langsung kepada umat katolik di 13 Paroki se-Kota Semarang dengan berbagai macam strategi dan bentuk pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi umat untuk terlibat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan menjadi penyelenggara pemilu dengan berbagai cara pendekatan kepada kelompok basis umat yang berada di paroki-paroki Kota Semarang.

Menurut data statistik Keuskupan Agung Semarang Tahun 2020, terdapat 13 paroki/gereja katolik yang tersebar di Kota Semarang. Gereja Katolik dalam pendidikan politik kepada umat tak terlepas dari peranannya sebagai sebuah institusi keagamaan, adalah sebagai berikut :

A. Peran Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang Dalam Pendidikan Politik Umat

1. Politik merupakan panggilan konstitutif

Pengajaran Gereja Katolik kepada umat memandang bahwa politik adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam kehidupan masyarakat dan ditujukan untuk berbicara tentang pengelolaan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh warga masyarakat, sehingga dasarnya Panggilan Konstitutif yang memiliki arti bahwa panggilan yang melekat akibat dari baptisan yang diterima sehingga setiap orang memiliki kewajiban untuk menciptakan kebaikan bersama tanpa memandang SARA.

2. Konsolidasi Komitmen para imam dan kaum religius

Konsolidasi Komitmen merupakan sebuah konsolidasi diantara para kaum tertahbis (Imam) dan kaum religius (biarawan-biarawati) yang menyatukan pikiran dan tujuan bersama diantara hirarkis gereja dan komitmen gereja katolik adalah bahwa Indonesia harus sesuai dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945.¹ Konsolidasi

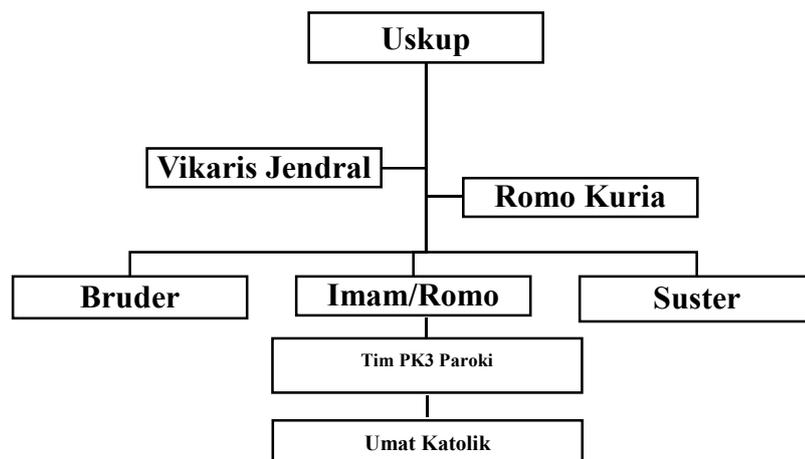
¹ Wawancara Romo Sugihartanto, Jum'at, 17 Januari 2020

ini memberikan pemahaman kepada kaum tertahbis agar memiliki pemikiran dalam bingkai yang sama yaitu Bhinneka Tunggal Ika.

Peran para kaum tertahbis sungguh sangat jelas mengarahkan umat untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik dan berpartisipasi dalam pemilu tahun 2019, melalui renungan-renungan yang mereka bawakan ketika perayaan ekaristi di gereja, dilingkungan rumah, juga permenungan yang mereka sampaikan menjadi dasar gereja katolik mendukung penuh umat untuk terlibat dengan menggunakan hak pilihnya dengan baik, tentu ini menjadi perhatian penting bagi gereja katolik karena terlibat dalam kegiatan politik merupakan perwujudan iman secara mendalam serta tanggungjawab terhadap bangsa dan negara.

Berikut bagan pola pendidikan politik dan konsolidasi komitmen yang dilakukan oleh Gereja Katolik :

Pola Pendidikan Politik dan Konsolidasi Komitmen



3. Membangun jejaring kelompok

Membangun jejaring kelompok merupakan salah satu tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Keuskupan Agung Semarang melalui PK4AS dengan menjalin kerjasama dengan beberapa stakeholder dan juga ormas-ormas katolik seperti KPU dan Bawaslu diajak untuk bekerjasama melakukan pendidikan politik dengan mengajarkan beberapa teknis dan sosialisasi untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik. Dalam penelitian ini, PK4AS sebagai motor pendidikan politik Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang beserta PK3 Paroki Mater

Dei bekerjasama dengan KPU Kota Semarang untuk melakukan pendidikan politik kepada umat dengan menyelenggarakan kegiatan yang bertajuk “Sosialisasi dan Pendidikan Pemilu Bagi Umat“ pada 27 Februari 2019 di Aula Bunda Allah, Gereja Mater Dei Lampersari Semarang. Lebih dari 100 orang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut yang terdiri pengurus lingkungan, kelompok kategorial, orang muda katolik dan dewan paroki, serta mengundang tokoh setempat seperti Kyai, Lurah Lamper Kidul, dan tokoh masyarakat lain. Kegiatan ini membahas mengenai rekam jejak calon-calon yang berkontestasi, dan juga pengenalan 5 surat suara oleh Relawan Demokrasi.

Selain peran stakeholder, Pendidikan politik yang dilakukan oleh Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang tidak terlepas dari peran serta dari ormas-ormas katolik yang juga terlibat didalamnya seperti contohnya adalah Pemuda Katolik Komisariat Daerah Jawa Tengah yang diketuai oleh Stefanus Agus Tri Haryanto, juga turut melakukan pendidikan politik dengan mengadakan diskusi bersamadan pengenalan para caleg katolik Kota Semarang di Kantor KPP Keuskupan Agung Semarang dengan mengundang tokoh pemuda, OMK di Kota Semarang dan juga pengurus Pemuda Katolik Komcab Kota Semarang.

Selain Pemuda Katolik, salah satu ormas yang gencar dalam pendidikan politik adalah WKRI (Wanita Katolik Republik Indonesia) yang diketuai oleh Ibu Maria Tri Sujilah Sukirwanta yang melakukan pendidikan politik kepada anggotanya dengan menggunakan kegiatan Pleno Ranting yang wajib diikuti oleh semua anggota ranting. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan pemaparan, diskusi dan arahan langsung dari WKRI DPD Jawa Tengah serta pengenalan calon-calon yang berkontestasi dalam pemilu, teknis pemilu serentak, dan pengenalan surat suara.

4. Peran Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan (PK3) Paroki

Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan (PK3) Paroki memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Romo Paroki dalam mengelola bidang Kerasulan Kemasyarakatan agar umat katolik yang

berkiprah dibidang sosial politik terdampingi dengan baik, dan mewujudkan kesadaran umat katolik sebagai Warga Negara Indonesia akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara, melakukan pendidikan politik kepada umat menjelang dan pasca pemilu, serta mendampingi dan mengelola aktivis-aktivis sosial kemasyarakatan.

Dari 13 paroki di Kota Semarang, pendidikan politik dilakukan dengan mengundang umat katolik berada di aula paroki dan dibekali mengenai praktek mencoblos surat suara, dan pengenalan surat suara kepada umat secara langsung dan penjelasan mengenai caleg-caleg katolik, seperti contohnya adalah PK3 Paroki St. Ignatius Krapyak yang dikoordinator oleh Bapak Ignatius Benni Kristono. Kegiatan dalam rangka menjelang pemilu yang dilakukan oleh PK3 Paroki St. Ignatius adalah dengan program srawung kepada tokoh umat dan tokoh masyarakat yang sering disebut dengan “Grebeg Subali” yang merupakan kegiatan lintas agama tokoh masyarakat dan tokoh gereja yang diadakan di Balai Kelurahan dengan tujuan untuk bersama-sama menjaga keutuhan dan selamatan menjelang pemilu tahun 2019.

B. Strategi Pendidikan Politik Keuskupan Agung Semarang Dalam Pendidikan Politik Umat

Adapun berbagai strategi yang dilakukan Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang dalam melakukan pendidikan politik kepada umatnya menjelang pemilu tahun 2019 sebagai berikut :

1. Media Sosial Uskup Agung Semarang

Uskup Keuskupan Agung Semarang, Mgr. Robertus Rubiyatmoko adalah uskup yang memiliki akun Instagram yang sangat aktif sebagai tokoh agama yang memiliki pengaruh yang kuat terutama dalam mendekati basis kaum muda yang identik dengan sosial media instagram. Uskup merupakan pemimpin tertinggi dalam keuskupan, sehingga apa yang dikatakan seorang uskup akan berdampak pada umatnya secara signifikan.

Melalui akun resminya, Mgr.Rubiyamoko (@mgr.robertus.rubiyatmoko), beberapa kali menggunggah postingan secara langsung mengenai ajakan kepada umat katolik untuk ambil

bagian dengan terlibat secara langsung menggunakan hak pilihnya dalam pemilu serentak tahun 2019 baik berupa foto maupun video. Ada 8 konten yang dibagikan beliau melalui akun Instagram resminya dengan kurun waktu 4 bulan menjelang pemilu yang mulai dari tanggal 18 Januari 2019 hingga pada 17 April 2019.

Postingan Mgr. Robertus Rubiyatmoko tersebut juga dikomentari oleh ribuan umat bahkan tidak hanya katolik namun umat agama lain pun juga ikut berkomentar menyambut baik pesan uskup tersebut. Secara pendidikan politik, Bapa Uskup melakukan pendidikan politik utamanya kepada kaum muda katolik yang banyak menggunakan sosial media tersebut.

2. Media Sosial Youtube Komisi Sosial Keuskupan Agung Semarang

Media sosial Youtube Komisi Sosial (KOMSOS) Keuskupan Agung Semarang juga dinilai sangat efektif dan gencar sebagai media sosial yang menyangkan mengenai pendidikan politik melalui video-video singkatnya. Ada sebanyak 5 konten menarik yang diunggah dengan berbagai judul yaitu sebagai berikut :

1. “Monsyinyur Rubiyamoko dan Dulcoblos coblosan” yang diunggah pada 04 Februari 2019 dan mencapai 4.201x tayang. Dalam video tersebut diilustrasikan percakapan antara Dul dan Bapa Uskup mengenai permenungan pemimpin yang bisa ditemukan dalam Surat Pertama Rasul Paulus kepada Timotius 3:1-7 yang mengisahkan tentang penilik jemaat yang harus memiliki sikap bijaksana, dapat menahan diri, peramah, pendamai, dan bukan hamba uang.
2. “Cebong Vs Kampret” yang diunggah pada 18 Februari 2019 dan mencapai 980x tayang. Dalam video tersebut memberi pesan bahwa kita terjebak dalam istilah cebong dan kampret yang hanya untuk kepentingan sesaat, kita lupa bahwa kita adalah Indonesia. Mungkin kita beda dalam pilihan, tetapi kita saudara dalam kemanusiaan dan kebangsaan.

3. “Sarno#1: Ojo Golput” yang diunggah pada tanggal 19 Februari 2019 dan ditonton sebanyak 1.408x tayang. Dalam video tersebut tersebut memberi pesan bahwa setiap warga negara itu harus melek politik dan mempunyai pilihan, kita harus ambil bagian dengan cara milih wakil rakyat dan pimpinan yang bisa memperbaiki keadaan dengan menggunakan hak pilih pada pemilu.
4. “Sarno#2: Pemilih Cerdas” yang diunggah pada tanggal 21 Februari 2019 dan ditonton sebanyak 1.394x tayang. Dalam video tersebut tersebut memberi pesan bahwa memberi pesan bahwa kita harus menjadi pemilih yang cerdas dengan memperhatikan rekam jejak calon, visi-misi, programnya dan partainya serta yang pro terhadap Pancasila dan NKRI. “Rekam jejak itu adalah catatan apa saja yang pernah dilakukan si calon untuk masyarakat dan negara, jangan sampai kita memilih orang yang hanya memakai kekuasaan untuk kepentingan diri dan golongan, contohnya sudah pernah korupsi.
5. “Sarno#3: Tolak Politik Uang!” yang diunggah pada tanggal 23 Februari 2019 dan ditonton sebanyak 3.518x tayang. Dalam video tersebut tersebut memberi pesan bahwa kita harus menolak politik uang, maksudnya adalah seseorang tidak boleh memberikan uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan seseorang, karena ada pasalnya. Selain itu dipesan terakhirnya dalam video ini adalah “Negara tidak akan maju jika dipimpin oleh orang yang memperjualbelikan kekuasaan“

3. Media Massa Keuskupan Agung Semarang

Media massa milik Keuskupan Agung Semarang seperti Majalah Salam Damai juga menampilkan berita mengenai pendidikan politik. Dalam majalah edisi 113, volume 11 yang terbit Bulan Maret 2019 dengan judul “Ayo Gunakan Hak Pilihmu” ini memberi gambaran bahwa Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang secara serius melakukan pendidikan politik. Ada beberapa artikel dari tulisan para romo hingga kaum awam yang berkaitan dengan pendidikan

politik itu sendiri. Berikut beberapa artikel yang dimuat yang berisi tentang konten pendidikan politik kepada umat.:

1. Artikel yang berjudul “Kenali-Pilih-Kawal” pada halaman 4 yang ditulis oleh Romo Edi Purwanto, Pr selaku Vikaris Jendral Keuskupan Agung Semarang yang berisi pesan bahwa warga katolik yang tidak ambil bagian dalam pemilu sama artinya tidak mewujudkan iman katoliknya dengan baik, dan memberikan kesempatan kepada calon pemimpin yang rekam jejaknya buruk untuk memimpin negeri ini.
2. Artikel yang berjudul “Kenali-Pilih-Kawal” halaman 6 yang ditulis oleh Romo Marcellinus Tanto, Pr yang merupakan Pastor Kepala Paroki St. Fransiskus Xaverius Kebon Dalem ini menekankan kepada umat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu tahun 2019 dan mengajak umat untuk menjunjung nilai-nilai kesatuan dan persatuan serta persaudaraan demi terciptanya kedamaian dan ketentraman selama pemilu ini berlangsung.
3. Artikel yang berjudul “5 Menit Menentukan 5 Tahun Nasib Bangsa” halaman 10 yang ditulis oleh Romo Raymundus Sugihartanto, Pr. memberi pesan kepada umat betapa pentingnya pemilu, lalu dibahas mengenai apa saja yang harus dipertimbangkan umat dalam memilih, cara menggunakan hak pilih, dan praktek-praktek apa saja yang perlu dihindari dalam pemilu.
4. Ada pula coretan ilustrasi pada halaman 41, yang dibuat oleh Romo Koko yang tujuannya adalah mengajak umat katolik untuk ambil bagian dengan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sebagai pengamalan Pancasila.

Selain melalui strategi diatas, Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang juga melakukan katekese/pengajaran iman tentang politik, pendampingan dan pendataan kepada para caleg katolik, bekerjasama dengan Komisi Kerasulan Kemasyarakatan ditingkat paroki se-Kota Semarang, dan melalui para biarawan dan biarawati, serta pendidikan politik juga dilakukan hingga

pada tataran wilayah/lingkungan sebagai wilayah terkecil dibawah naungan paroki.

C. Bentuk Pendidikan Politik

Bentuk pendidikan politik yang dibangun oleh Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang kepada umat katolik di wilayah Semarang salah satunya adalah dengan membentuk tim khusus untuk melakukan konsolidasi. Konsolidasi dibagi menjadi 3 yaitu konsolidasi partisipasi, kaderisasi, dan komitmen. Berikut penjelasan dari masing-masing konsolidasi :

1. Konsolidasi Partisipasi merupakan bentuk pendidikan politik kepada umat berupa pendidikan kewargaaraan dan mendorong umat untuk terlibat sebagai caleg, penyelenggara pemilu, dan pemilih yang cerdas kepada umat katolik di Keuskupan Agung Semarang. Dalam konsolidasi ini, gereja katolik Keuskupan Agung Semarang melakukan pendampingan dengan menerbitkan nota pastoral, modul pendampingan umat katolik, dan juga pertemuan berkala Tim Komisi Kerasulan Masyarakat (PK3) Paroki.
2. Konsolidasi Kaderisasi bentuk pendidikan politik kepada umat katolik yang berupa mempersiapkan umat katolik dengan memberi pembekalan khusus dan dipertemukan dengan Bapa Uskup berupa adanya program “*Candidate School*” dan Kaderisasi Perempuan yang dilaksanakan oleh PK4AS dengan tujuan untuk mendorong umat katolik untuk siap menjadi kader yang siap berkiprah dalam bidang sosial kemasyarakatan.
3. Konsolidasi Komitmen adalah penyadaran umat sebagai warga negara untuk terlibat secara penuh dalam pemilu Tahun 2019 baik sebagai pemilih yang cerdas maupun penyelenggara pemilu.

Bentuk Pendidikan politik lain adalah dengan *FGD (Forum Group Discussion)*, seminar dan diskusi serta refleksi kitab suci selama kurang lebih 1-2 jam. Dalam wawancaranya yang diungkapkan Pak Agustinus Arief Setiawan, selaku Ketua PK3 Paroki Mater Dei mengatakan bahwa proses pendidikan politik dilakukan di Paroki

Mater Dei dengan cara diskusi dan refleksi kitab suci agar umat katolik memahami secara mendalam peranannya sebagai warga negara. Bentuk pendidikan politik lainnya adalah dengan dialog interaktif antara PK4AS sebagai Keuskupan Agung Semarang dengan umat secara langsung. Seperti yang disampaikan Bapak Y.B. Sulistyono dalam wawancaranya mengatakan bahwa pelaksanaan pendidikan politik di Paroki St. Fransiskus Xaverius Kebon Dalem Semarang diadakan sebanyak 2 (dua) kali dan dihadiri oleh 138 orang yang terdiri dari pengurus lingkungan, OMK (Orang Muda Katolik), prodiakon dan para suster serta umat umum di paroki Kebon Dalem.

Bentuk pendidikan politik di paroki yang lain pun juga dilakukan dengan cara sosialisasi langsung kepada umat baik melalui seminar seperti yang dilakukan oleh umat di Paroki St. Perawan Maria Ratu Rosario Suci Katedral, yang mengundang umat yang tergabung dalam kelompok kategorial, pengurus lingkungan, dan OMK (Orang Muda Katolik) dan para lansia.

D. Temuan Penelitian

Pendidikan Politik yang dilakukan Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang di 13 Paroki Kota Semarang berupa diskusi, Forum Grup Discussion (FGD), pemaparan, dan seminar serta refleksi kitab suci secara umum mendapatkan respon yang beragam, seperti umat katolik yang setuju dengan adanya pendidikan politik yang dilakukan gereja katolik akan dapat menerima dan menyambut dengan baik dengan ikut terlibat dalam pendidikan politik tersebut bahkan merespon dengan antusias menghidupkan diskusi dengan aktif bertanya, seperti yang terjadi di Paroki St. Petrus Sambiroto, St. Perawan Maria Ratu Rosario Suci, Paroki St. Paulus Sendangguwo, Paroki St. Yusup Gedangan, Paroki St. Athanasius Agung Karangpanas, dan Paroki St. Maria Fatima Banyumanik serta Paroki St. Theresia Bongsari.

Dibalik umat yang menyambut pendidikan politik terdapat di beberapa paroki justru merespon kurang setuju karena berbagai macam hal. Seperti yang disampaikan Bapak Tukiman Taruno dalam wawancaranya mengatakan bahwa yang menjadi kendala pendidikan politik ini adalah respon umat yang beragam mulai dari yang setuju dengan yang tidak setuju

gereja katolik melakukan pendidikan politik. Dari ketiga belas paroki di Kota Semarang yang telah menerima pendidikan politik dari gereja katolik sedikitnya ada 5 paroki seperti Paroki Keluarga Admodirono, Paroki St. Ignatius Krapyak, Paroki Hati Kudus Yesus Tanah Mas, Paroki Mater Dei, dan Paroki St. Fransiskus Xaverius Kebon Dalem yang sebagian umat kurang setuju diadakannya pendidikan politik. Respon umat yang kurang setuju diadakannya pendidikan politik ini membuatnya tidak mau berpartisipasi atau enggan terlibat dalam pendidikan politik yang dilakukan di paroki mereka masing-masing.

Sebagai contohnya adalah respon umat dari Paroki St. Fransiskus Xaverius Kebon Dalem yang merespon bahwa pendidikan politik itu tidak penting dan tidak memberikan keuntungan bagi mereka, sehingga sebagian dari umat kebon dalem yang merupakan seorang pedagang enggan terlibat atau hadir saat pendidikan politik di gelar di paroki Kebon Dalem. Hal yang sama juga terjadi di paroki Keluarga Kudus Admodirono dan Paroki Mater Dei Lampersari yang merespon bahwa pendidikan politik tidak menarik sebab berbau politik menjadi isu yang tidak seksi dikalangan umat. Mereka beranggapan bahwa politik tidaklah penting dan lebih mementingkan sisi liturgis dalam gereja seperti doa-doa, ibadat, dan berbagai upacara keagamaan dianggap lebih penting daripada pendidikan politik itu sendiri.

Pendidikan politik di Paroki St. Ignatius Krapyak, dan Paroki Hati Kudus Yesus Tanah Mas juga merespon kurang setuju dikalangan Orang Muda Katolik (OMK). Keterlibatan Orang Muda Katolik (OMK) dalam pendidikan politik dinilai masih sangat minim dengan memberikan respon cuek dan anti bahkan alergi terhadap politik sehingga seperti tidak membutuhkan pendidikan politik.

Umat katolik yang yang tidak setuju dengan pendidikan politik yang dilakukan di paroki mereka masing-masing merespon dengan memilih untuk tidak hadir atau tidak terlibat saat pendidikan politik dilakukan di paroki mereka masing-masing.

Dalam konteks pendidikan politik menjelang pemilu serentak tahun 2019 yang dilakukan kepada umat katolik di Kota Semarang dinilai bahwa Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan (PK4AS) terlalu mengarahkan

umat untuk memilih calon tertentu. Dalam wawancaranya, Paulus Widyantoro mengemukakan bahwa gereja masih mengarahkan untuk calon tertentu sehingga calon lain merasa sakit, sehingga hal ini yang perlu dievaluasi bahwa sebagai penyelenggara pendidikan politik gereja katolik harus netral. Aloysius Wasino, Ketua PK3 Paroki St. Paulus Sendangguwo juga mengatakan hal yang sama dalam wawancaranya, bahwa Gereja Katolik tidak boleh mengarahkan pada satu calon tertentu meskipun itu sesuai dengan visi gereja katolik melainkan membimbing umat agar umat dapat memilih sesuai dengan pilihannya masing-masing.

Sementara disisi lain, pendapat berbeda disampaikan oleh Tukiman Taruno, anggota PK4AS dalam wawancaranya mengemukakan bahwa umat selalu minta petunjuk siapa yang harus dipilih. Maka dalam kesempatannya ketika PK4AS selalu memunculkan figur sebagai pilihan politik hal ini justru bertolak belakang dengan pilihan umat sehingga memunculkan anggapan bahwa gereja katolik tidak netral. Temuan di beberapa paroki seperti di Paroki St. Paulus Sendangguwo dan Paroki Hati Kudus Yesus Tanah Mas serta di Paroki St. Theresia Bongsari, PK4AS mengarahkan umat untuk memilih Paslon Jokowi-Mahruf Amin karena dinilai dari rekam jejak paslon dan partai pengusung, sehingga menjadi alasan PK4AS untuk memilih paslon tersebut. Hal inilah yang menunjukkan anggapan disebagian umat katolik sendiri bahwa gereja katolik tidak netral dalam melakukan pendidikan politik kepada umatnya.

SIMPULAN

Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang sebagai sebuah kelompok kepentingan yang berinstitusi keagamaan yang melembaga secara formal, dan memiliki jaringan organisasi yang kuat serta keanggotaan yang bersifat resmi memusatkan perhatiannya pada upaya untuk melakukan pendidikan politik kepada umat atas dasar tanggungjawab sebagai sebuah kelompok kepentingan. Peran Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang dalam pendidikan politik dilakukan dengan memanfaatkan jaringannya baik secara internal maupun eksternal dalam mendukung langkahnya. Secara internal Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang menggunakan kekuatan hirarkisnya untuk menyatukan komitmen melalui

konsolidasi yang dibangun diantara para imam dan kaum religius (biarawan-biarawati), mengoptimalkan peran Ormas Katolik seperti Pemuda Katolik dan WKRI, serta menggunakan PK3 Paroki sebagai jembatan PK4AS dalam melakukan pendidikan politik kepada umat katolik. Sementara secara eksternal, Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang melakukan peranannya dengan menggandeng KPU dan Bawaslu dalam melakukan pendidikan politik kepada umatnya.

Dalam melakukan pendidikan politik kepada umatnya, Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang juga melakukan beberapa strategi dan bentuk pendidikan politik seperti memanfaatkan jejaring media sosial berupa Instagram Bapa Uskup dan youtube komsos keuskupan, melalui media cetak salam damai, melakukan pendataan dan pendampingan kepada caleg katolik dan katekese politik/pengajaran iman. Sementara bentuk pendidikan politik berupa temu pastoral, konsolidasi gereja katolik, diskusi dan seminar serta penyebarluasan surat gembala. Secara umum sebagai sebuah kelompok kepentingan, Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang melalui PK4AS telah melakukan peranannya dalam melakukan pendidikan politik walaupun masih terdapat kendala yang dialami gereja katolik sendiri seperti sebagian umat yang kurang tertarik dan enggan untuk terlibat dalam sosialisasi politik yang dilakukan gereja katolik, dan minimnya keterlibatan kaum muda dalam pendidikan politik serta ketidaknetralan gereja katolik sebagai penyelenggara dalam pendidikan politik.

SARAN

Berdasarkan simpulan dari analisis yang telah dilakukan, Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang dalam melakukan pendidikan politik kepada umatnya hendaknya memilih strategi dan bentuk yang disesuaikan dengan perkembangan jaman, misalnya dengan konten-konten yang menarik sehingga keterlibatan umat dalam pendidikan politik semakin banyak dan diharapkan gereja katolik bersifat netral dengan tidak mengarahkan umat untuk memihak calon manapun, dengan demikian pendidikan politik kepada umat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kepada peneliti berikutnya diharapkan mengkaji lebih dalam bagaimana peran pastor/romo dalam pendidikan politik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adolf Heuken, *Ensiklopedi Gereja* Jilid II: C – G. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2004, Hlm. 182

Dewan Karya Pastoral KAS, *Nota Pastoral 2004: Umat Beriman Dan Panggilan Politik Dalam Konteks Kemajemukan Masyarakat Indonesia*, Hlm. 33 – 34

Dewan Karya Pastoral KAS, *Nota Pastoral 2018: Merevitalisasi Nilai – Nilai Pancasila Dan Semangat Kebangsaan Demi Terwujudnya Peradaban Kasih*, Hlm. 40 – 57

Kartono, Kartini. 2009. *Pendidikan Politik : Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung : Mandar Maju

Rukmindani Trisrini, Agustina. 2007. *Gereja dan Pemilu*. Yogyakarta : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.

Handoyo, Eko., dan Puji Lestari. 2017. *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya

Moleong dan Lexy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Hlm. 199.

Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: CV Solusi Distribusi.

Surat Gembala yang dikeluarkan Bapa Uskup pada 05 Februari 2019 dengan judul “*Jadilah Pemilih Yang Beriman, Cerdas, Dan Bijaksana Sebagai Perwujudan Rasa Cinta Tanah Air Indonesia*”

Majalah Salam Damai Edisi 113, volume 11 yang terbit Bulan Maret 2019

INTERNET

<https://www.youtube.com/watch?v=0GSRzs6bhkg> Diakses pada 29 April 2020

<https://www.youtube.com/watch?v=NjOEd7G5LQU>. Diakses pada 29 April 2020

<https://www.youtube.com/watch?v=Sz6B9IVAnpI>. Diakses pada 29 April 2020

<https://www.youtube.com/watch?v=vpulsFxDs78>. Diakses pada 29 April 2020

<https://www.youtube.com/watch?v=qYf8qkK-Ddk>. Diakses pada 29 April 2020

WAWANCARA

Wawancara dengan Ketua Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Semarang (PK4AS), Romo Raymundus Sugihartanto, Pr, 17 Januari 2020.

Wawancara dengan Pemuda Katolik Komisariat Daerah Jawa Tengah, Stefanus Tri Haryanto, 04 Maret 2020

Wawancara dengan Vikaris Jendral Keuskupan Agung Semarang, Romo Edi Purwanto, Pr, 05 Februari 2020.